

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut (Sarafina & Saifi, 2017), kinerja keuangan suatu perusahaan adalah patokan utama untuk mengukur baik atau tidaknya kinerja sebuah perusahaan dan hal ini dapat kita lihat melalui laporan keuangan perusahaan. Indikator yang paling sering digunakan ialah melalui risiko keuangan. Rasio yang umum digunakan adalah rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.

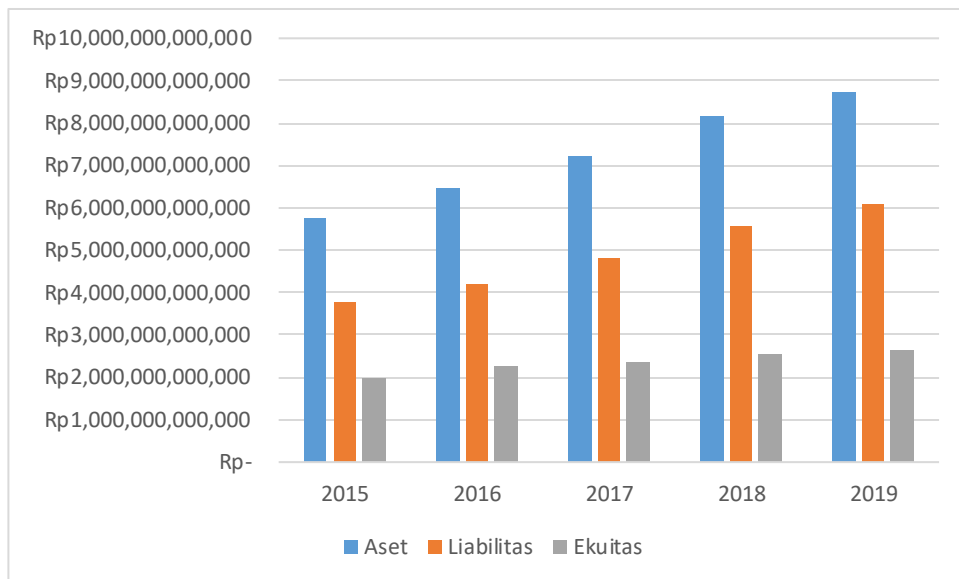
Perusahaan merupakan salah satu faktor yang memiliki peran sentral dalam perekonomian negara. Di Indonesia sendiri terdapat tiga jenis badan usaha, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi.

Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada perusahaan yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah korporasi yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan yang tergabung dalam BUMN diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian Indonesia dan menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta diharapkan mampu memberi kontribusi bagi para *stakeholder*.

Dengan peran penting yang dimiliki BUMN saat ini, tentu ini menjadi beban tersendiri untuk BUMN dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor yang semakin banyak berdiri dan berkembang, serta mendorong perekonomian negara untuk dapat bersaing dalam pasar *global*. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi BUMN mengingat banyak peristiwa-peristiwa terkait dengan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan

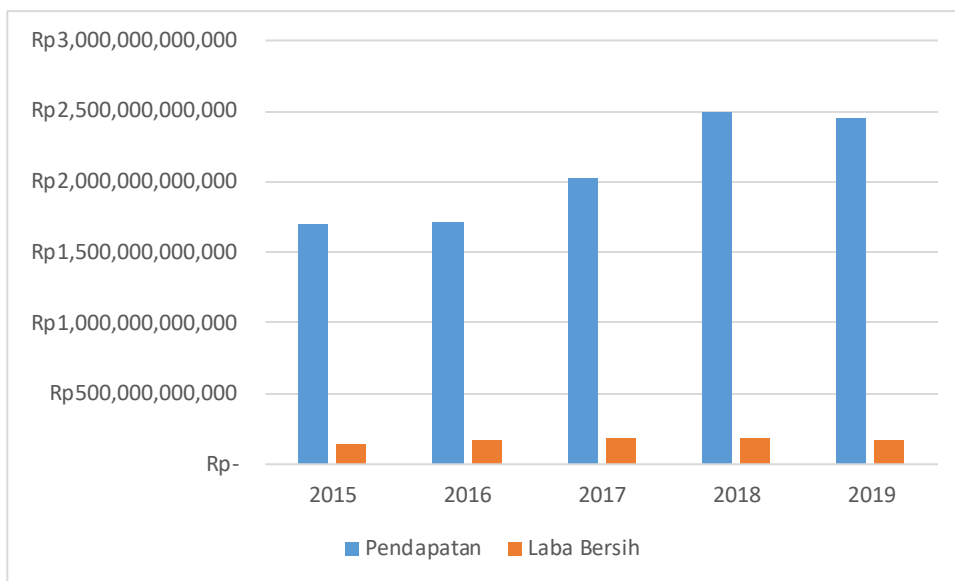
Nepotisme) dan kecurangan-kecurangan terkait laporan keuangan yang masih banyak terjadi dan dilakukan oleh petinggi-petinggi perusahaan. Apabila, hal ini terus berlanjut dapat dipastikan perusahaan BUMN dan negara akan kehilangan kepercayaan dari para *stakeholders*, bahkan perekonomian Indonesia tidak akan dapat bersaing secara *global*.

Berikut adalah data yang dikumpulkan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia periode 2015-2019.



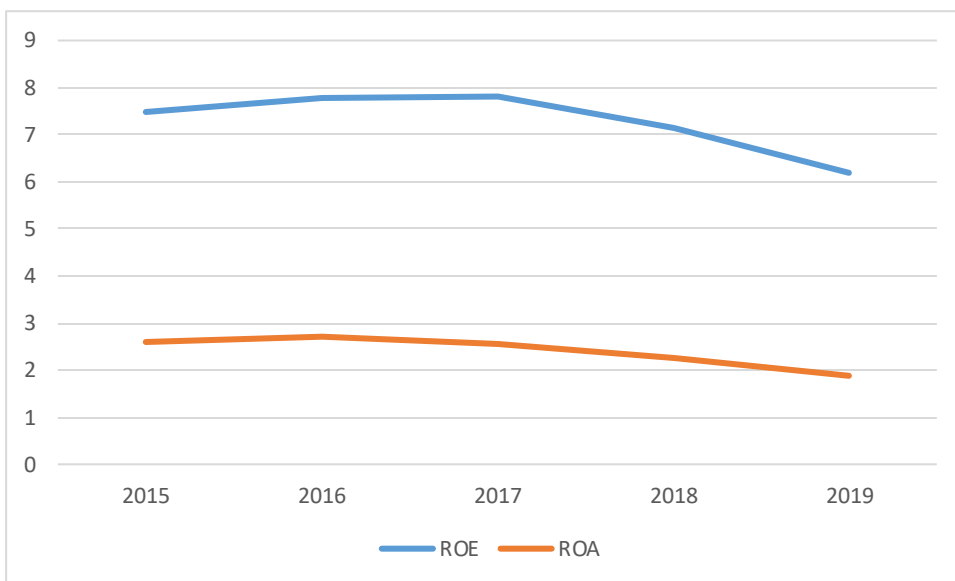
Gambar 1.1: Grafik Posisi Keuangan BUMN

Sumber: www.bumn.go.id (Data diolah, 2021)



Gambar 1.2: Grafik Pendapatan dan Laba BUMN

Sumber: www.bumn.go.id (Data diolah, 2021)



Gambar 1.3: Grafik ROA dan ROE BUMN

Sumber: www.bumn.go.id (Data diolah, 2021)

Pada gambar 1.1, posisi keuangan Badan Usaha Milik Negara mencerminkan tingkat modal yang bertumbuh secara tidak signifikan setiap tahunnya dengan menggunakan perhitungan total aset, liabilitas, dan ekuitas, sedangkan pada gambar 1.2 dan 1.3

menunjukkan tingkat pendapatan dan laba yang tidak stabil sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan menghitung total dari *revenue*, *net income*, *return on assets* (ROA), dan *return on equity* (ROE).

Meskipun secara umum kinerja finansial menunjukkan adanya peningkatan, namun dilihat dari sisi produktivitasnya, kinerja Badan Usaha Milik Negara belum mengalami perbaikan hal ini antara lain terlihat dari *return on assets* (ROA) yang perkembangannya dari tahun ke tahun tidak meningkat secara konsisten bahkan sempat mengalami penurunan.

Good corporate governance (GCG) adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitar.

Tantangan dalam *good corporate governance* (GCG) adalah mencari cara memaksimalkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa, sehingga tidak membebankan ongkos yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas.

Good corporate governance sendiri memiliki 5 prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran.

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk menilai *good corporate governance* dalam suatu perusahaan, yang juga akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: komisaris independen dan komite audit.

Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok terhadap perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, dengan cara mendorong anggota dewan komisaris yang lain agar dapat melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direktur secara efektif serta dapat memberikan nilai tambah bagi

perusahaan (Sofi'ah & Amanah, 2019). Maka, semakin banyak jumlah komisaris independen dalam perusahaan semakin kecil kemungkinan konflik dalam perusahaan akan terjadi karena komisaris independen bersifat netral.

Menurut (Thesarani, 2017), komite audit adalah auditor internal yang dibentuk dewan komisaris, bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan pengendalian internal perusahaan. Tentunya, komite audit ini memegang peranan penting terkait pengendalian internal perusahaan secara langsung karena komite audit memiliki wewenang untuk mengakses laporan audit dan laporan lainnya, serta dapat berhubungan langsung dengan tim auditor internal dan eksternal.

Dengan begitu, semakin banyak komposisi komite audit dalam perusahaan dapat mengurangi kecurangan yang dapat dilakukan oleh manajemen dan tentunya hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor karena kinerja perusahaan dapat terawasi dengan baik.

Good Corporate Governance (GCG) sangatlah penting. Berdasarkan sejarahnya, Amerika Serikat pernah mengalami krisis pada tahun 1929 akibat *market crash*. Perekonomiannya sendiri kembali pulih, setelah merestrukturisasi *corporate governance*-nya.

Good Corporate Governance bagi perusahaan BUMN sangatlah penting dan tentunya memiliki dampak yang berbeda, apabila dibandingkan dengan perusahaan swasta. BUMN mempunyai tugas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Ketika perusahaan negara tidak menerapkan prinsip *good corporate governance* ini, bisa dipastikan negara akan mengalami kerugian besar, termasuk rakyat yang ada di negara tersebut.

Contohnya, seperti kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menggemparkan Indonesia. Berawal dari kesalahan dalam mengelola dana investasi, yang kemudian berkembang menjadi kemungkinan adanya korupsi dan pencucian uang (*money laundering*). Bahkan, sejak tahun 2006 tercatat PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah dinyatakan memiliki ekuitas negatif, kemudian di tahun 2008, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan perusahaan dikarenakan penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan pun semakin besar. Akibat kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) ini, negara mengalami kerugian hingga Rp 16 triliun (“Jiwasraya, Dari Salah Investasi Hingga Gagal Bayar Rp12,4 T,” 2020).

Tidak dapat dipungkiri lagi, BUMN mempunyai peran yang besar dalam perekonomian negara, sebagai pilar perekonomian. Perusahaan BUMN perlu menerapkan prinsip GCG ini dengan tegas, sehingga negara tidak mengalami kerugian, melainkan perusahaan ini bisa mendongkrak perekonomian negara, bahkan menjadi contoh yang benar bagi perusahaan swasta.

Dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terdapat beberapa perbedaan hasil, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Novi dan Nurul (2018) menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *return on equity* (ROE), sementara dalam penelitian yang dilakukan M. Dicky dan Kusuma (2019), Nuriya dan Sri (2021), Ima dan Lailatul (2019), dan Syiendrawati, *et al.* (2021) menyatakan komisaris independen berpengaruh terhadap *return on equity* (ROE). Pada penelitian Nuriya dan Sri (2021) menyatakan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, sementara penelitian yang dilakukan Andri (2015), M. Dicky dan Kusuma (2019),

serta Syiendrawati, *et al.* (2021) menyatakan komite audit memiliki pengaruh terhadap ROE. Dalam penelitian yang dilakukan Abdul dan Ulil ((2017), Amira, *et al.* (2018), Parulian dan Lorina (2020), Jaya (2015), Agus dan Refianto (2019), serta Mila dan David (2020) menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ROA. Sementara, penelitian yang telah dilakukan oleh Helfina, *et al.* (2016), Intan dan Ida (2016), Okta dan Iwan (2020), serta Salsabila dan M. Saifi (2017) menyatakan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Agus dan Refianto (2019), Amira, *et al.* (2018), Salsabila dan M. Saifi (2017), Parulian dan Lorina (2020), serta Mila dan David (2020) menyatakan komite audit berpengaruh terhadap ROA. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Abdul dan Ulil (2017), Helfina, *et al.* (2016), Okta dan Iwan (2020), Indriyani dan Rinda (2019), serta Parulian dan Lorina (2020) menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA.

Dengan begitu, kali ini peneliti akan melakukan penelitian dengan dengan periode penelitian terbaru dan dengan objek penelitian yang berbeda, serta menggunakan 2 variabel dependen yang terdiri dari *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE).

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada BUMN Indonesia pada Periode 2016-2020)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?

2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan, yang diukur menggunakan ROA (*Return on Assets*) dan ROE (*Return on Equity*) pada BUMN Indonesia periode 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk perusahaan BUMN dalam menerapkan *Good Corporate Governance* secara optimal untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
2. Bagi perkembangan dunia akademik
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan pengetahuan mengenai penerapan *Good Corporate Governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3. Bagi penelitian selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan perbaikan untuk diteliti dan dikaji lebih jauh terkait pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan.